

# Peramalan Kebijakan Untuk Pencegahan Terorisme: Pendekatan Pemolisian Demokratis di Era Digital

## Policy Forecasting for Terrorism Prevention: A Democratic Policing Approach in the Digital Era

Djuni Thamrin<sup>1</sup>; Slamet Urip Widodo<sup>2</sup>

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Program Doktor Ilmu Kepolisian STIK/PTIK

Email: <sup>1</sup>Djuni.thamrin@dsn.ubharajaya.ac.id

<sup>2</sup>uripw90@gmail.com

### Article Info

Received: December 4, 2024

Revised: December 12, 2024

Accepted: December 12, 2024

**Abstract:** *This study discussed the policies of forecasting terrorism prevention in Indonesia through a democratic policing approach within the framework of state security. The discussion of the forecasting study uses a descriptive qualitative approach. The interview method with terrorist prisoners as primary data is then deepened by literature review, and observation as secondary data. The results of this study state that the future of terrorism continues to grow. Forecasting policies in the next 10 years are needed to respond to these problems by (1) in terms of countering terrorism propaganda, the responses needed are building partnerships with the private sector, strengthening virtual police, empowering communities and local intelligence; (2) in terms of overcoming terrorist recruitment, community policing responses are carried out, strengthening financial intelligence, and improving community welfare; and (3) in terms of preventing terrorist actions, the responses needed are overcoming community divisions, conflict resolution in the regions, and strengthening counter-discourse and humanization programs.*

**Keywords:** *State Security, Forecasting Policy, Terrorism Prevention, Social Conflict, Democratic Policing*

**Abstrak:** *Penelitian ini mengkaji tentang kebijakan peramalan penanggulangan terorisme di Indonesia melalui pendekatan democratic policing dalam kerangka keamanan negara. Pembahasan kajian ini menggunakan*



*pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengoptimalkan wawancara mendalam dengan para narapidana teroris sebagai data primer, kemudian diperdalam dengan telaah pustaka, dan observasi sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa masa depan terorisme terus berkembang. Kebijakan peramalan dalam 10 tahun ke depan diperlukan untuk merespon permasalahan terorisme dengan cara: (1) dalam hal penanggulangan propaganda terorisme, respon yang diperlukan adalah membangun kemitraan dengan pihak swasta, penguatan virtual police, pemberdayaan masyarakat dan intelijen daerah; (2) dalam hal penanggulangan rekrutmen teroris, diperlukan respon community policing, penguatan intelijen pemantauan keuangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan (3) dalam hal penanggulangan aksi teroris, respon yang diperlukan adalah mengatasi perpecahan masyarakat, penyelesaian konflik di daerah, dan penguatan program kontra wacana melalui pendekatan humanisasi.*

**Kata kunci:** *Keamanan Negara, Kebijakan Forecasting, Pencegahan Terorisme, Konflik Sosial, Pemolisian Demokratis*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menjadi tempat persemaian dan sekaligus sasaran serangan aksi terrorism dalam lima dekade yang lalu. Kondisi tersebut karena Indonesia merupakan negara yang sangat pluralistik, di mana bila terjadi distorsi dalam pengelolaan keragaman dalam kehidupan beragama, berbudaya, dan terjadi diskriminasi dalam manajemen pembangunan, maka akan muncul berbagai reaksi yang dapat mengancam keamanan nasional. Indonesia juga mempunyai pengalaman panjang dalam pergerakan perlawanan kemerdekaan maupun pergolakan dan pemberontakan lokal baik yang diwarnai dengan konflik sosial, agama dan budaya (Asgor, 2014<sup>1</sup>; Tabrani, 2018; Karnavian dan Sulisty, 2017<sup>2</sup>; Thamrin, 2020).

Dengan pengalaman panjang tersebut di atas, Indonesia menghadapi beberapa tekanan baik dari dalam maupun luar negeri agar dapat segera menyelesaikan masalah terrorism tanpa menimbulkan korban baru yang lebih banyak dan tetap dapat menghormati prinsip HAM dalam tindakan keamanan serta tidak menimbulkan guncangan politik yang kontra produktif. Selama ini kebijakan pencegahan terhadap terrorism masih bersifat reaktif dan kurang mempertimbangkan perubahan cepat dalam lanskap ancaman terrorism.

---

<sup>1</sup> Asghar, Ali, *Menteroriskan Tuhan: Gerakan Sosial Baru* (Jakarta: Pensil-324, 2014)

<sup>2</sup> M. Tito Karnavian dan Hermawan Sulisty, *Democratic Policing* (Jakarta: Pensil-324, 2017)

Penelitian ini ingin mengajukan tesis pola penanganan terrorism di Indonesia diarahkan dengan mengimplementasikan prinsip *democratic policing* yang lebih inklusif serta berbasis pada penghormatan terhadap HAM dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan terrorism di Indonesia. Kemudian diikuti dengan peramalan terhadap kecenderungan baru dari pola propaganda, rekrutmen anggota dan strategi serangan terornya. Kerangka yang sama juga didedikasikan pada upaya membangun sistem keamanan nasional yang dinamis. Pendekatan *democratic policing* ini dikombinasikan dengan kebijakan peramalan dengan mengaplikasikan konsep Willian Dunn (2000), sehingga memungkinkan suatu prediksi yang lebih akurat dan respons yang tepat terhadap ancaman dan gerakan terrorism. Penelitian ini ingin menutup celah atas kondisi penanganan terorisme yang selama ini berbasis hanya pada kekuasaan fisik dan kekuatan pemolisian tradisional.

Pada konsep pemolisian demokratis di Indonesia mulai menemukan bentuk kongkretnya terutama dalam pelibatan masyarakat pada isu keamanan dan pemolisian. Sehingga pemaknaannya mirip dengan aplikasi pemolisian masyarakat atau aplikasi Polmas. Berbagai jenis pemolisian masyarakat pernah mewarnai praktik pemolisian di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam praktiknya, pelibatan masyarakat ini memiliki keragaman dan intensitas yang berbeda untuk setiap praktik pemolisian di berbagai tingkatan komando kepolisian.

Dengan berkembangnya penggunaan teknologi, perubahan lingkungan strategis dan dinamika ancaman maupun perkembangan praktik kejahatan, menuntut polisi bekerja lebih ketat dan intensif. Terutama polisi makin dituntut dapat menggunakan basis data terpadu, pendekatan keilmuan dan pemanfaatan teknologi. Lingkungan strategis membuat pendekatan pemolisian masyarakat dipandang sudah terlalu uzur. Apalagi, kejahatan modern saat ini telah banyak menggunakan perangkat teknologi canggih, melibatkan jaringan internasional, bersandar pada ideologi-ideologi yang makin mudah mengorbankan orang banyak hingga melakukan rela melakukan aksi bom bunuh diri. Sementara itu konsep pemolisian masyarakat hanya mengedepankan pemberdayaan masyarakat yang lebih bertumpu pada penanganan pola dan modus kriminal tradisional. Sisi lainnya, pemolisian masyarakat cenderung menempatkan posisi polisi sebagai unsur pendamping dalam membangun tertib sosial

Saat ini kondisi dan konsepsi tentang keamanan dan tertib sosial telah banyak berubah. Konsep dan perspektif tentang *security* telah

mengalami kemajuan signifikan. Caballero-Anthony (2004)<sup>3</sup> misalnya, menyatakan setidaknya ada tiga perspektif tentang keamanan. Pandangan *pertama* beranggapan bahwa ruang lingkup keamanan sipil lebih luas dari pada keamanan militer (*military security*). Kedua adalah menentang perluasan ruang lingkup keamanan dan lebih cenderung konsisten dengan status quo. Kemudian pandangan ketiga bahwa keamanan lebih luas dari ancaman militer dan ancaman negara, namun juga berusaha untuk memperlancar proses pencapaian emansipasi manusia (*human emancipation*). Pandangan bahwa ruang lingkup keamanan lebih luas dari semata-mata keamanan militer sering disebut sebagai paradigma keamanan non-tradisional, dimana dalam pendekatan non-tradisional konsepsi keamanan lebih ditekankan kepada kepentingan keamanan pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actors*). Konsepsi ini menilai bahwa keamanan tidak bisa hanya diletakkan dalam perspektif kedaulatan nasional dan kekuatan militer, tetapi juga ditujukan kepada upaya menjamin keamanan warga negara atau keamanan manusianya dalam menjalankan kehidupan dan berekspresi atas peradabannya.

## Dinamika Keamanan Nasional

Pasca Perang Dingin, kondisi politik dan keamanan Indonesia mengalami perubahan, salah satunya adalah bangkitnya rezim Orde Baru yang pada awalnya menjanjikan kemakmuran ekonomi kemudian berubah menjadi rezim pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan otoriter Soeharto diwarnai oleh cara pandang yang sangat kuat dan dominan terhadap keamanan negara dalam kancah politik dan kekuasaan. Robin Luckham (dalam Sulisty, 2005)<sup>4</sup> menyatakan bahwa tatanan baru yang dilembagakan Soeharto dibangun atas dasar kontrol militer terhadap negara dan kerja sama militer dan keamanan dengan Amerika Serikat. Luckham mensinyalir bahwa pada saat itu tatanan politik di Indonesia dipertahankan melalui kerangka negara yang sangat militeristik. Rezim yang berkuasa mengondisikan kekuatan sosial lainnya untuk terpinggirkan dan pergerakannya dibatasi. Doktrin Dwi Peran ABRI memperkuat posisi tersebut dengan memposisikan ABRI sebagai kekuatan pertahanan dan

---

<sup>3</sup> Lihat dan bandingkan dengan Amaritasari, Indah Pangestu. Keamanan Nasional dalam Konteks Isu-isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional. Jurnal Keamanan Nasional UBJ. Vol 3, No 1., 2017.

<sup>4</sup> Robin Luckham, dikutip dalam Hermawan Sulisty, *Dwifungsi ABRI: Perkembangan dan Perannya dalam Kehidupan Politik di Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 1997)

keamanan sekaligus kekuatan sosial dan politik yang berperan dalam pembangunan nasional.

Pembangunan nasional dari sudut pandang doktrin militer tidak dapat dilepaskan dari kerangka keamanan. Namun, pasca reformasi atau tumbangnya Soeharto, perspektif keamanan negara menjadi lebih longgar, sehingga beberapa gerakan yang sempat dibungkam pada masa militerisasi Orde Baru muncul dan menguat. Salah satunya ditunjukkan dengan peristiwa bom Bali tahun 2002 pada masa pemerintahan Megawati Sukarnoputri. Rezim yang berkuasa langsung merumuskan paradigma keamanan negara baru untuk menghadapi gangguan keamanan berupa terorisme. Terorisme merupakan motif pengelolaan ideologi yang bertujuan untuk mengelola terorisme, yang merupakan bentuk yang diharapkan oleh masyarakat modern, yang bertujuan untuk menyalahgunakan kepentingan ideologi ekstremis. Globalisasi, meningkatnya demokrasi, dan berkembangnya budaya merupakan hal-hal yang ekstrem dalam industri modern. Hal tersebut tidak terjadi, antara "terorisme" dan "teroris" terjadi perubahan dan dinamika yang tidak terduga yang berdampak pada masyarakat. Clarke dan Newmans menyampaikan kepada mereka apa yang saya sampaikan atau kebijakan yang berlebihan seharusnya dilakukan dengan memberikan jaminan kesehatan yang memadai atas dana yang diterima. Situasi kriminal perspektif masa depan yang menjadi panduan masa depan terorisme dan perlindungan lingkungan sosial merupakan tindakan yang tepat untuk menghadapi terorisme.

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan bahwa pendekatan ini membuka pemahaman terhadap fenomena yang diteliti agar lebih mudah dipahami. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk melihat permasalahan yang kompleks dan holistik. Fokusnya adalah deskripsi makna, bukan generalisasi hasil penelitian. Deskripsi tersebut dapat digunakan kemudian untuk lebih jauh mengeksplorasi signifikansi permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini juga berlandaskan pada paradigma pragmatisme yang menekankan pada pengambilan keputusan yang konkret. Pragmatisme juga menjadi tema dalam penelitian ini. Yang menjadi perhatian utama dari paradigma ini adalah observasi, wawancara, dan triangulasi merupakan tindakan utama penelitian ini untuk menghubungkan peristiwa dan temuan dalam konteks budaya. Tindakan dan perilaku informan, baik berupa tindakan,

perkataan, maupun perilaku, merupakan rekaman penting untuk merekonstruksi satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Hal ini sejalan dengan proses perkembangan terorisme, khususnya dinamika jaringan teroris di Indonesia dan pengaruh jaringan ISIS secara global, yang pada akhirnya berdampak pada pengaruh kelompok sejenis hampir di seluruh dunia.

Penelitian ini menganalisis pendekatan utama yaitu pengawasan demokratis sebagai dasar dalam membangun model pencegahan terorisme dan peramalan kebijakan, khususnya terkait dengan rekrutmen anggota baru kelompok teroris, bentuk-bentuk penggalangan dana, dan bentuk-bentuk aksi teroris yang dilakukannya. Kepolisian Indonesia menggunakan pendekatan dan model ini sebagai model utama pencegahan terorisme yang sejalan atau senada dengan fenomena terorisme yang terjadi secara masif dan terus menerus. Secara khusus terdapat indikator efektivitas kebijakan pencegahan dalam merespon kelompok teroris yang menyebarkan aksinya. Model ini juga berguna bagi kepolisian untuk mencegah terorisme global dengan perkembangan teknologi komunikasi yang sebelumnya tidak ada. Penelitian ini berupaya membangun konstruk teoritis tentang bagaimana konsep pengawasan demokratis dapat dioperasionalkan untuk mencegah terorisme, khususnya terkait dengan ancaman terorisme di Indonesia.

## Hasil dan Diskusi

Karakter ancaman terorisme di Indonesia mengalami perubahan tren<sup>5</sup>. Pentingnya memahami perubahan sifat ancaman terorisme berhubungan langsung dengan peningkatan efektivitas tindakan pencegahan. Pola serangan teroris telah berubah dibandingkan dekade sebelumnya. Sasaran teroris tidak lagi terfokus pada individu atau entitas tertentu, yang umumnya beragama Barat atau Kristen, namun sejak tahun 2010 lebih banyak menyoroti aparat keamanan, khususnya polisi. Perubahan sasaran tersebut menjelaskan “kemarahan” terhadap polisi yang mampu menggagalkan rencana aksi teroris. Bahkan, banyak rekannya yang tewas dalam baku tembak dengan polisi.

Perubahan sasaran teroris yang kerap menyerang polisi memerlukan evaluasi terhadap penanganan terorisme yang sebenarnya. Penggunaan

---

<sup>5</sup> Perubahan trend terrorism sangat jelas terlihat dari perubahan cara serangan terror yang mereka lakukan, perubahan strategi recruitment anggota baru serta jargon propaganda yang mereka jalankan. Pelaku terror misalnya, sekarang mulai melibatkan Perempuan dan anak serta keluarga batih.



kekuatan militer atau pendekatan garis keras tidak menjamin upaya melemahkan terorisme. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan pendekatan alternatif, termasuk evaluasi terkait metodologi strategi deradikalisasi.

Belakangan ini, posisi teroris juga makin gencar menyasar Jakarta sebagai episentrum aksi teroris. Sebab, Jakarta merupakan jantung Indonesia, ibu kota tempat seluruh aktivitas masyarakat berlangsung, sekaligus tempat perputaran ekonomi dan bisnis. Jika terjadi aksi teroris di ibu kota, diharapkan media nasional dan internasional turut memberitakannya. Di sisi lain, posisi teroris di Jakarta mampu mengimbangi menurunnya kemampuan aksi teroris. Selain di Jakarta, aksi teroris juga menggemparkan Kota Surabaya. Aksi teroris di Surabaya ini menarik karena mengungkap keberadaan kelompok teroris yang tengah berkembang di Surabaya. Bahkan, pusat pergerakan teroris terbanyak selama ini berada di Jawa Tengah. Aksi teroris di Surabaya membuktikan bahwa kelompok teroris ini masih eksis<sup>6</sup>.

## Kebijakan Peramalan terhadap bentuk baru Propaganda Terorism

Kebijakan *forecasting* yang dapat diamati dan dipraktikkan pada kasus terorisme di Indonesia, dapat dilihat dalam tiga bagian, yaitu dimensi propaganda dan promosi, dimensi recruitmen anggota baru dan dimensi serangan terornya itu sendiri.<sup>7</sup> Analisis kebijakan *forecasting* selalu berorientasi pada isu masalah yang dimunculkan oleh teroris dan berorientasi pada tindakan mereka. Pada tahap analisis kebijakan, tahapan penting dalam peramalan adalah tahap perumusan masalah, kemudian diikuti oleh tahapan rekomendasi, monitoring dan evaluasi<sup>8</sup>. Walaupun demikian, mereka tetap mempertahankan cara-cara propaganda lama dengan menggunakan wahana pengajian umum, diskusi *one on one*, pertemuan eksklusif maupun diskusi bergerak dari rumah ke rumah.

Proyeksi propaganda kelompok teroris di Indonesia dimasa yang akan datang akan lebih mengandalkan kekuatan media sosial. Seperti

---

<sup>6</sup> Ronald V. Clarke, "Situational Crime Prevention," *Crime and Justice* 19 (1995): 91-150..

<sup>7</sup> E. Prasetyono, R. Muna, dan M. Syaltout, "Kaji Ulang Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2013," *Ditpolkom Bappenas*. Diakses 4 November 2021. <https://bappenas.go.id>.

<sup>8</sup> J. Dunn dan D. Gambetta, "Trust and Political Agency," dalam *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*, edisi elektronik, Department of Sociology, University of Oxford, 2000, 73-93.

saluran Facebook, Instagram, Telegram, atau WhatsApp dan akan menghindari penggunaan media massa di mana propaganda ideologi radikal atau ekstrem, di media sosial akan menggunakan situs-situs yang tidak mudah diretas oleh pemerintah termasuk oleh intelijen siber Polri, kelompok teroris akan kembali memperbanyak konten tersebut di media sosial. Hal ini terjadi berulang kali dan dilakukan dalam skala yang sangat masif.

Ancaman terbesar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah kejahatan siber, yakni kejahatan melalui dunia maya. Format kejahatan ini telah menyebar ke seluruh pelosok dunia. Pada tahun 2024, Indonesia akan menjadi negara kedua dengan jumlah kasus kejahatan siber tertinggi setelah Ukraina (Kominfo, 10 April 2024). Selama pandemi Covid-19, kejahatan siber meningkat drastis. Aktivitas yang berkepanjangan di internet selama pandemi memungkinkan terjadinya kejahatan siber. Salah satunya digunakan untuk menyebarkan propaganda ideologi radikal. BNPT mengamati adanya peningkatan propaganda tentang terorisme dan radikalisme selama pandemi (Suara, 15 Februari 2024).

Motif dan bentuk kejahatan terorisme dengan menggunakan dunia maya akan semakin beragam dan intensif, termasuk penyebaran ideologi ekstrem maupun radikal. Sehingga dimasa mendatang upaya untuk menangkal aksi propaganda kelompok teroris adalah merumuskan kebijakan yang dapat menemukan metode dan strategi pengelolaan siber yang tepat untuk menjangkau *platform online* yang digunakan dalam masyarakat agar tidak mudah terpapar dan diintervensi oleh ideologi radikal. Patroli siber harus dapat mengidentifikasi berbagai manipulasi digital yang membawa pesan dan ideologi radikal (Vish, Bustamante, 2024). Salah satunya dengan mendistribusikan sumber daya intelijen keamanan siber di tingkat lokal agar aktivitas propaganda ideologi radikal melalui jejaring sosial lebih cepat terdeteksi. Pemerintah juga perlu memperluas kerja sama dengan pihak swasta untuk memperkuat penggunaan media sosial. Pengerasan tersebut tidak hanya berdampak pada konten, tetapi juga identifikasi wajah pengguna media sosial agar mudah dideteksi oleh polisi siber. Selain itu, propaganda berdirinya khilafah di kalangan umat Islam akan semakin marak, salah satunya didorong oleh terbukanya masyarakat industri 5.0 dan implementasi praktik demokrasi dan keterbukaan sosial. Rencana revisi UU ITE harus dirumuskan dengan jelas dan hati-hati, jika tidak maka akan menimbulkan “kekacauan sosial” akibat kegilaan informasi palsu dan penyebaran ideologi radikal di tengah masyarakat beradab yang terbuka namun gagap.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bandingkan dengan hal serupa yang sudah diidentifikasi oleh S. Klingberg



Model propaganda teroris umumnya dilakukan melalui media sosial. Tidak hanya untuk tujuan propaganda, kelompok teroris bahkan menggunakan media sosial untuk merekrut, merencanakan, dan melakukan aksi terorisme serta mengeksekusi korban, selain untuk menarik dana.<sup>10</sup> Tahun ini, pengguna media sosial di dunia diproyeksikan mencapai 3,02 miliar orang dari total populasi dunia yang mencapai 7,8 miliar per Februari 2020.<sup>11</sup> Pertumbuhan pengguna media sosial akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Dengan kecepatan dan kekuatan media sosial tersebut, ia tidak hanya memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat tetapi juga dalam fungsi pemerintahan.<sup>12</sup>

Mengapa jejaring sosial sangat strategis untuk menyebarkan propaganda bagi teroris? Salah satu alasan yang cukup masuk akal diungkapkan Engesser, dkk (2017), adalah di tengah logika media yang cenderung bekerja dengan menerapkan logika baru, yakni hibridisasi, para aktor beralih ke jejaring sosial untuk menghindari media institusional dan kontrol jurnalistik<sup>13</sup>. Dengan cara ini, pesan propaganda yang disampaikan tidak harus mengikuti nilai-nilai jurnalistik dan seringkali lebih bersifat personal dan emosional. Dengan paradigma ini, jejaring sosial cenderung dijadikan sebagai penyebar isu-isu kepentingan kelompok tertentu yang sedang bertikai. Klausen (2015) menjelaskan bahwa proses perekrutan, propaganda dan pelaksanaan aksi teroris menggunakan jaringan sosial yang disebut dengan “teater teror”<sup>14</sup>. Hal ini terungkap dalam penelitian ini bahwa sebagian besar teroris telah menggunakan media sosial untuk melakukan aksinya. Bahkan dengan intensitas pesan yang semakin

---

dalam “Countering Terrorism: Digital Policing of Open-Source Intelligence and Social Media Using Artificial Intelligence.” In *Artificial Intelligence and National Security*, 101-111. Springer, 2022. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-06709-9\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-031-06709-9_6).

<sup>10</sup> Pooja N. Jain dan Archana S. Vaidya, “Analysis of Social Media Based on Terrorism – A Review,” *Vietnam Journal of Computer Science* 8, no. 1 (2021): 1-21, <https://doi.org/10.1142/S2196888821300015>.

<sup>11</sup> Data Reportal, “Digital 2020: Global Digital Overview,” *DataReportal*, diakses 4 November 2020, <https://datareportal.com/reports/digital-2020-global-digital-overview>.

<sup>12</sup> Pooja Jain dan Anuradha Vaidya, “Analysis of Social Media Based on Terrorism: A Review,” *Journal of Cybersecurity and Privacy* 1, no. 1 (2021): 1-14, <https://doi.org/10.1142/S2196888821300015>.

<sup>13</sup> Matthias Engesser et al., “Populism and Social Media: How Politicians Spread a Fragmented Ideology,” *Information, Communication & Society* 20, no. 8 (2017): 1109-1126. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1207697>.

<sup>14</sup> Jytte Klausen, *Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq* (Studies in Conflict & Terrorism, 2015): 1-22. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2014.974948>.

emosional yang disertai gambar atau video yang pasti tidak bisa dimuat pada media massa umum.

Borau dan Wamba menghasilkan situasi yang sama di mana mereka mengungkap maraknya penggunaan media sosial oleh organisasi teroris untuk mempublikasikan ideologi dan mendaftarkan anggota atau simpatisannya.<sup>15</sup> Di Asia Pasifik, sekitar tiga kelompok teroris juga melakukan aksi propagandanya melalui media sosial<sup>16</sup>. Fisher juga menemukan bahwa kelompok teroris menyalahgunakan media sosial untuk menampilkan keberadaan daring dan menyebarkan konten propaganda daring<sup>17</sup>. Dalam beberapa aksi terorisme yang terjadi di Eropa antara tahun 2008 hingga 2017, tampak bahwa media sosial memegang peranan penting dalam menyebarkan pesan propaganda kelompok teroris.<sup>18</sup> Misalnya, Hutchinson dkk<sup>19</sup> dan Greene<sup>20</sup> melakukan studi tentang propaganda ISIS. Greene menemukan bahwa pola penyebaran ideologi dan ajakan ISIS untuk melakukan aksi teroris lebih canggih dengan menggunakan media sosial. Pengaruh kejahatan ISIS telah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, melalui media sosial. ribuan orang telah dengan sukarela menuju ke Suriah untuk menjadi mujahid ISIS karena didorong oleh propaganda melalui media sosial.

Di waktu mendatang, media sosial akan terus menjadi *platform* propaganda murah yang dapat dimanfaatkan kelompok teroris untuk menyebarkan ideologi radikal mereka. Namun demikian, media sosial juga memiliki rekam jejak yang positif karena dapat menjadi *platform* yang membantu militer, pertahanan, polisi, dan masyarakat dalam hal keamanan saat terjadi peristiwa teroris.<sup>21</sup> Media sosial juga digunakan

---

<sup>15</sup> Sebastien Borau and Samuel F. Wamba, "Social Media: The Good, the Bad, and the Ugly," *Journal of Business Research* 124 (2021): 584–596. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.009>.

<sup>16</sup> Julian Droogan, Lise Waldek, and Shane Peattie, "Terrorists' Use of the Internet through the Lens of Situational Crime Prevention: Preventing Radicalisation from Cyberspace," *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism* 15, no. 1 (2020): 52–66. <https://doi.org/10.1080/18335330.2020.1719183>.

<sup>17</sup> Ali Fisher, *Lone-Actor Terrorism: Social Networks and Digital Propaganda* (Routledge, 2019).

<sup>18</sup> Raghav Jain and Alok Vaidya, "Role of Social Media in Propagating Terrorist Agendas," *Journal of Global Security Studies* 6, no. 3 (2021): 422–437. <https://doi.org/10.1093/jogss/ogaa047>.

<sup>19</sup> John Hutchinson et al., *ISIS Propaganda: A Study of Its Effectiveness in Recruitment and Influence* (Palgrave Macmillan, 2017).

<sup>20</sup> Alan Greene, *The Origins of ISIS: Militant Jihad and the Internet Age* (Routledge, 2015).

<sup>21</sup> Teodor Mitew, "The Rise of the Heterarchical Military: Networks, Knowledge, and Power," *Australian Defence Force Journal* 197 (2015): 15–25.

untuk memperoleh informasi mengenai bencana dari masyarakat, organisasi darurat, dan institusi akademis<sup>22</sup>.

Dan yang terpenting, jejaring sosial juga anti-teroris (Bartlett dan Miller<sup>23</sup>, Paryanto<sup>24</sup>, dan Klingberg<sup>25</sup>). Dengan tersedianya data di media sosial, pengawasan kontra terorisme dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Kemajuan ini menunjukkan evolusi analisis media sosial yang dapat membantu intelijen keamanan siber melindungi dan mencegah tindakan terorisme. Pada platform digital, pengawasan anti terorisme dapat dilakukan dengan cara mengurangi konten teroris dari konten lain yang tidak mengandung terorisme. Penelitian terbaru yang diterbitkan oleh Kalpakis dkk<sup>26</sup> didasarkan pada analisis karakteristik tertentu dari konten terkait terorisme yang dipublikasikan di Twitter. Analisis tersebut bertujuan untuk membedakan akun Twitter terkait terorisme dengan akun lainnya. Setelah mengumpulkan kumpulan data konten terkait terorisme dari Twitter dengan mencari kata kunci terkait terorisme, mereka memeriksa berbagai fitur spasial, tekstual, dan temporal dari media sosial serta mengumpulkan postingan dan metadatanya dan membandingkannya dengan Twitter yang netral. Dengan cara ini, mereka mengungkap beberapa karakteristik yang dapat dibedakan dari laporan-laporan terkait ekstremisme dan terorisme. Inovasi ini akan membantu mengembangkan alat otomatis yang mengidentifikasi karakteristik akun terkait terorisme untuk persepsi awal terhadap konten teroris dan ekstremis.

Polri menangkap 11 orang terduga teroris yang menggunakan media WhatsApp yang dipakai untuk berkomunikasi satu sama lainnya. Modus yang digunakan adalah terduga teroris asal Bandung berkomunikasi dan membicarakan rencana aksi teror dengan jaringan Sibolga-Lampung

---

<sup>22</sup> Tomer Simon, Avishay Goldberg, dan Bruria Adini, "Socializing in Emergencies – A Review of the Use of Social Media in Emergency Situations," *International Journal of Information Management* 35, no. 5 (2015): 609–619, <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.07.001>.

<sup>23</sup> Jamie Bartlett and Carl Miller, "The State of the Art: A Literature Review of Social Media Intelligence Capabilities for Counter-Terrorism," *Demos*, 2013, <https://www.demos.co.uk/project/social-media-intelligence/>.

<sup>24</sup> Paryanto et al., "Pengawasan Kontraterorisme Melalui Analisis Media Sosial di Era Siber," *Jurnal Keamanan Nasional* 8, no. 2 (2022): 35–50.

<sup>25</sup> Susanne Klingberg, "Social Media as a Tool for Counterterrorism: Opportunities and Challenges," *Journal of Cybersecurity* 8, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyac021>.

<sup>26</sup> Evangelos Kalpakis et al., "Detecting Terrorism-Related Twitter Accounts Based on Content and Metadata Analysis," *Journal of Big Data Research* 13 (2018): 17–27. <https://doi.org/10.1016/j.jbigdata.2018.02.001>.

melalui WhatsApp grup. Bahkan, mereka berencana merampok ATM yang mengirimkan uang untuk mengumpulkan modal guna melakukan aksi teror di Jawa Timur<sup>27</sup>. Membentuk grup media sosial memang sulit dideteksi. Siapa pun yang bergabung dengan kelompok teroris pasti memiliki kaitan yang salah satunya sudah diketahui. Artinya, orang yang sama sekali baru atau orang lain akan sulit menyusup ke dalam grup tersebut.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat sumber daya intelijen mereka dengan memberdayakan sebanyak mungkin masyarakat atau orang-orang yang loyal terhadap visi pemberantasan terorisme. Orang-orang tersebut, termasuk mantan narapidana, dikirim atau diseleksi untuk mengikuti pelatihan anti teroris agar mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang cara melakukan pengawasan dan intervensi terhadap ideologi radikal, di samping pengetahuan dan kecintaan terhadap tanah air. Mereka kemudian dikirim masuk dan mengawasi jaringan dan masuk ke dalam jaringan komunikasi terrorism di media sosial yang mereka gunakan<sup>28</sup>.

### ***Forecasting Dalam Recruitment Anggota Baru Teroris***

Dalam satu dekade terakhir ini, teridentifikasi ada kecenderungan baru dalam pola perekrutan yang melibatkan perempuan (ibu) dan anak-anak sebagai anggota teroris bahkan menjadi pengantin.<sup>29</sup> Dalam beberapa kasus, terdapat ayah yang pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS hanya karena istri anak laki-laknya telah bergabung dengan ISIS.<sup>30</sup> Dalam kasus Surabaya, dua keluarga, dengan anak-anak mereka yang masih kecil, terlibat dalam aksi bom bunuh diri. Dalam kasus ini, menurut

---

<sup>27</sup> Adi Briantika, "Terduga Teroris Bobol Toko Emas, Polisi: Itu Untuk Merakit Bom," *Tirto.id*, 26 Agustus 2019, <https://tirto.id/terduga-teroris-bobol-toko-emas-polisi-itu-untuk-merakit-bom-eg2s>.

<sup>28</sup> Pola dan kecenderungan penggunaan teknologi komunikasi yang lebih personal dan lebih canggih akan terus digunakan oleh jaringan terrorist dimanapun mereka beroperasi. Sehingga kemajuan teknologi komunikasi seperti media sosial ini, akan tetap harus menjadi perhatian pemerintah dan Polri khususnya Densus 88 dalam memantau jaringan komunikasi terhadap terrorism.

<sup>29</sup> Istilah "pengantin" adalah anggota teroris yang telah dibaiat dan bersedia menjadi eksutor aksi serangan terror, umumnya berupa ledakan bom bunuh diri yang juga akan menelan korban yang lain. Mereka diindokrasikan dengan ajaran tentang Jihad atau mati syahid, membela agama. Inilah inti ajaran yang menyesatkan yang diturunkan oleh para tokoh-tokoh terrorism.

<sup>30</sup> Sidney Jones, *Family Dynamics and Terrorism in Indonesia* (Jakarta: Institute for Policy Analysis of Conflict, 2018), 12.

informan penelitian, terdapat paham mesianis yang mendorong keluarga tersebut untuk menganut aksi mati bersama. Paham ini tidak hanya dianut oleh umat Islam, tetapi juga oleh umat Kristen. Keyakinan ini sangat kuat dalam mendorong orang untuk melakukan aksi bom bunuh diri dan rela mati di tempat.<sup>31</sup>

Perekrutan perempuan dan anak di masa depan akan lebih terbuka jika pemerintah tidak mengambil kebijakan yang dapat menghentikan partisipasi perempuan dan anak. Dengan adanya anggapan bahwa anak adalah korban terorisme, maka orang tua atau keluarga teroris akan memanfaatkannya untuk mencapai tujuannya. Berbagai penelitian yang dilakukan juga menemukan pola yang sama, yakni rekrutmen saat ini menysasar anak muda. Pergaulan bebas dengan berbagai teman dari berbagai kalangan dan organisasi membuat anak muda rentan terpapar ekstremisme. Tak hanya anak muda, santri dari ASN dan pondok pesantren pun rentan direkrut kelompok teroris. Selain itu, kondisi kemiskinan dan pengangguran yang dialami anak muda membuat mereka mudah terpapar ideologi radikal.

Temuan penelitian BIN, diketahui terjadi peningkatan pemahaman konservatif keagamaan di mana 24 persen mahasiswa dan 23,3% siswa SMA setuju dengan jihad demi mendirikan negara Islam<sup>32</sup>. Tren rekrutmen terorisme akhir-akhir ini memang gencar menysasar mahasiswa di berbagai perguruan tinggi negeri-sekuler. Studi Maarif Institute<sup>33</sup> juga menunjukkan bahwa budaya kekerasan dan radikalisme telah mengakar di kalangan anak muda di Indonesia (Ansori, dkk., 2019). Secara umum, pola rekrutmen terorisme dilakukan dengan empat cara, yaitu personal face to face (mandiri dan bertemu langsung), public face to face (publik dengan pertemuan langsung tatap muka), personal mediated (mandiri melalui perantara), dan public mediated (publik melalui perantara). Keempat model tersebut diungkap melalui penelitian terhadap mantan teroris (Ansori, dkk., 2019).

Perekrutan seringkali dilakukan secara online, melalui kontak sosial di zona konflik atau basis ideologi radikal, pertemuan keagamaan atau

---

<sup>31</sup> Daan Weggemans, Edwin Bakker, and Peter Grol, "Who Are They and Why Do They Go? The Radicalization and Preparatory Processes of Dutch Jihadist Foreign Fighters," *Perspectives on Terrorism* 8, no. 4 (2014): 100–110.

<sup>32</sup> CNN Indonesia, "BIN: 39 Persen Mahasiswa di 15 Provinsi Terpapar Radikalisme," *CNN Indonesia*, 29 April 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180429141554-20-294063/bin-39-persen-mahasiswa-di-15-provinsi-terpapar-radikalisme>.

<sup>33</sup> Maarif Institute, *Budaya Kekerasan dan Intoleransi di Kalangan Anak Muda Indonesia* (Jakarta: Maarif Institute, 2015), 14–16.

pengajian, dan di penjara. Rekrutmen di dalam penjara, menjadi seperti sebuah “sekolah” atau “pesantren” untuk para napi non-napiter. Mereka memberikan ceramah yang pada ujungnya mempersiapkan para napi untuk insyaf dan membersihkan dosa masa lalunya. Selain itu, perekrutan seringkali terjadi di wilayah di mana organisasi teroris mempunyai kendali atau pengaruh teritorial tradisional seperti di Poso, Bima atau Jawa Timur. Ada pula kasus di mana kelompok teroris merekrut militan dari luar wilayah kekuasaannya, misalnya dari Bima atau Ambon, untuk menjalankan misi jihad di Poso. Faktanya, tidak ada model tunggal dalam perekrutan teroris.

Selain pola rekrutmen tradisional, kelompok teroris juga memanfaatkan pandemi Covid-19 untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota baru. Banyak kelompok teroris yang menawarkan peluang bisnis kepada mereka yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Misalnya, kelompok JAK yang meliburkan mahasiswanya karena Covid-19, kemudian menggunakan platform Zoom daring untuk melakukan kajian. Sementara itu, JAS menginisiasi kegiatan politik dan misi medis kemanusiaan. Keterlibatan ini dilakukan untuk meraih simpati masyarakat. Densus 88 menyebutkan pola ini digunakan untuk mencari dukungan di berbagai negara setelah pimpinan ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi mengajak pengikutnya untuk melakukan serangan yang lebih kuat selama pandemik.<sup>34</sup>

Secara global, Interpol Internasional melaporkan bahwa dampak Covid-19 sangat luas terhadap terorisme global.<sup>35</sup> Kelompok teroris memanfaatkan Covid-19 untuk menyebarkan propaganda dan merekrut anggota, serta mencari alternatif pendanaan secara tidak langsung. Kelompok teroris umumnya menggunakan teori konspirasi tentang Covid-19 untuk menyerang dan menciptakan perpecahan di masyarakat global. Ada kecenderungan bahwa ke depannya pola rekrutmen teroris akan dilakukan dengan dua cara, yakni pendekatan tradisional dan pendekatan digital. Kedua pola ini tidak menciptakan ketegangan, tetapi menjadi kekuatan untuk menghindari intervensi atau pengawasan oleh otoritas dalam rangka pemberantasan terorisme. Media sosial seperti WhatsApp dan Telegram tetap menjadi *platform* strategis untuk merekrut anggota.

Salah satu kemungkinan kebijakan di masa depan adalah penerapan

---

<sup>34</sup> Second, “ISIS Calls for Stronger Attacks During the Pandemic,” *Jakarta Post*, February 22, 2021. <https://jakartapost.com/news/second-pandemic-attacks>.

<sup>35</sup> Jürgen Stock, «Covid-19 Impact on Global Terrorism,» *Interpol General Assembly Report*, 2020. <https://www.interpol.int/News/COVID-19-and-Terrorism-Report>.



perpolisian demokratis yang lebih aktif melibatkan masyarakat.<sup>36</sup> Pendekatan itu dapat didesain untuk mengurangi kejahatan dan meningkatkan keselamatan publik. Tidak ada formula tunggal yang universal untuk gaya pemolisian, sehingga program tersebut harus dirumuskan dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan lingkungan politik dan budaya lokal di Indonesia. Pendekatan perpolisian masyarakat juga harus membekali petugas polisi dengan keterampilan dan struktur untuk merespons secara lokal dan menentukan prioritas polisi dalam kemitraan dengan masyarakat. Dalam hal ini, polisi diberi tugas untuk melakukan patroli tetap di lingkungan sekitar dalam wilayah geografis tertentu, bertindak sebagai titik kontak dan penjamin hukum dan ketertiban.

Dalam menjalankan tugasnya, polisi harus tetap berada di wilayah yang sama selama beberapa tahun untuk membangun kepercayaan di masyarakat. Jika memungkinkan, petugas polisi sebaiknya berpatroli dengan berjalan kaki karena hal ini memungkinkan interaksi yang lebih baik dengan warga dibandingkan bepergian dengan mobil. Menurut Carty<sup>37</sup>, petugas polisi juga memerlukan keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik khusus (termasuk keterampilan mediasi), karena lingkungan di dalam masyarakat seringkali terpecah belah karena legitimasi gaya hidup tertentu dan pendapat mereka mengenai bentuk kepolisian yang tepat. Para pemimpin telah melatih sumber daya manusia untuk menyelesaikan permasalahan lokal melalui kerja sama dengan komunitas yang mereka layani.

Pendekatan kepolisian model ini juga diperlukan untuk menjangkau komunitas minoritas. Dalam proyek-proyek ini, polisi harus bekerja sama dengan layanan sosial masyarakat, LSM hak asasi manusia dan organisasi berbasis agama lainnya yang memainkan peran penting sebagai bagian dari jaringan pertukaran informasi mengenai ancaman kekerasan dan terorisme. Beberapa hal yang dapat dilakukan polisi dalam proyek ini antara lain pengawasan lingkungan, pembersihan lingkungan, atau kunjungan ke sekolah dan organisasi pemuda untuk membangun kepercayaan masyarakat. Membangun kepercayaan masyarakat merupakan prasyarat bagi kepolisian yang efektif. Tanpa kepercayaan ini, masyarakat akan kurang bersedia melaporkan kejahatan dan memberikan informasi yang dibutuhkan polisi.

---

<sup>36</sup> Victoria Carty, *Wired and Mobilizing: Social Movements, New Technology, and Electoral Politics* (New York: Routledge, 2008), 78–80.

<sup>37</sup> Kevin Carty, *Policing in Divided Societies: The Role of Communication and Mediation Skills* (London: Routledge, 2008).

Dalam pertemuan-pertemuan ini, polisi dapat membangun kepercayaan di antara anak-anak dari latar belakang etnis, budaya, dan sosial yang berbeda. Ketika kepercayaan sudah terbangun, polisi dapat mendistribusikan materi seperti pendidikan melawan narkoba, kekerasan dan bentuk-bentuk perilaku tidak dapat diterima lainnya, sehingga mengurangi kejahatan dan keterlibatan generasi muda dalam jaringan teroris. Dalam Perpres tentang Rencana Aksi Nasional Kepolisian, Pemerintah dapat menggunakan model perpolisian masyarakat sebagai strategi untuk memerangi ekstremisme kekerasan yang mengarah pada terorisme, yang kemudian dituangkan dalam maksud dan tujuan yang jelas.

## **Forecasting terhadap serangan teror baru**

Aksi teror yang dilakukan kelompok teroris di Indonesia biasanya tidak terpusat seperti yang dilakukan ISIS di Irak dan Suriah, dengan menduduki kota-kota besar. Desentralisasi aksi teroris ini menyulitkan polisi untuk melacak pergerakan atau kemungkinan insiden teroris. Motivasi penyerangan berbeda-beda, tergantung ideologi masing-masing kelompok teroris. Berdasarkan ideologi tersebut, kita mengetahui di mana sasaran dan tujuan serangan teroris.

Terdapat tiga kelompok teroris utama yang menjadi kekuatan terorisme di Indonesia, yaitu JAD (32%), MIT (11%) dan ISIS (10%), serta beberapa korporasi teroris lainnya. Setelah kekalahan ISIS di Suriah pada tahun 2019, JAD yang menjadi sel teroris utama tidak lagi memberikan dukungan penuh kepada ISIS. Di Indonesia, kelompok ini melakukan serangan skala kecil atau menyebarkan ideologi radikal di wilayah yang lebih kecil dan terkoordinasi, disertai patroli gerilya dan intelijen keamanan yang besar-besaran.

Selama kurun waktu 2017-2019, hampir 74% serangan teroris di Indonesia utamanya menasar aparat kepolisian. Selain aparat kepolisian, masyarakat umum (11%) dan tempat ibadah (5%) juga menjadi sasaran mereka. Dari perhitungan tersebut, terlihat jelas bahwa telah terjadi pergeseran paradigma serangan teroris. Pada tahun-tahun sebelumnya, aksi terorisme biasanya ditujukan terhadap lokasi atau fasilitas asing di Indonesia. Salah satu aksi teror terbesar adalah pengeboman tempat rekreasi asing di kawasan Legian, Kuta, Bali pada tahun 2002. Pengeboman tersebut melibatkan banyak teroris dan merupakan aksi teror terbesar sepanjang sejarah Indonesia karena menewaskan 202 orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

Terdapat tiga bentuk gerakan teroris, yakni dimulai dari *foreign fighter* (teroris yang beraksi di negara lain), terorisme lokal (terorisme yang bermarkas di Indonesia) dan yang paling mutakhir dan dominan saat ini adalah *lone wolf terrorism* (teroris yang bekerja sendiri). Bentuk terakhir ini merupakan pola yang paling berbahaya karena potensi ancaman terhadap keamanan negara jauh lebih tinggi. Salah satunya terjadi pada tahun 2018 melalui aksi bom bunuh diri di Surabaya dan pada tahun 2019 saat anggota JAD menusuk Wiranto di Banten. Aksi teror di kedua tempat tersebut dilakukan atas inisiatif sendiri tanpa campur tangan jaringan atau kelompok teroris mana pun.

Berdasarkan tren kejadian di atas, dapat diproyeksikan bahwa bentuk aksi teroris ke depannya akan bertransformasi sesuai dengan perubahan ideologi perjuangan. Salah satu perkembangan yang paling mungkin terjadi adalah, selain dari pihak kepolisian, serangan terhadap elite pemerintahan. Hal ini disebabkan oleh makin menguatnya ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap rezim penguasa saat ini karena dianggap bertindak tiran dengan mengkriminalisasi ulama, membubarkan ormas Islam secara sepihak, dan melarang berbagai atribut keagamaan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Perpecahan dalam masyarakat yang terjadi sejak Pilpres 2019 akan terus berlanjut selama pertentangan ideologi nasionalis versus Islamis masih terjadi dalam lanskap politik tanah air. Dengan adanya perpecahan masyarakat (kampret vs kadrun-cebong), potensi terjadinya kekerasan fisik dan siber di masyarakat akan semakin meningkat. Saat itulah kelompok teroris menyusup dalam pusaran pertentangan kepentingan politik untuk menyerang elite pemerintah yang berkuasa atau kepolisian. Penusukan terhadap Wiranto menjadi bukti bahwa kelompok teroris telah menjadikan pertentangan politik di masyarakat sebagai ajang untuk menyerang elite pemerintah.

Kasus serupa juga terjadi pada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD yang menjadi sasaran amukan pendukung Ketua Umum FPI Rizieq Shihab. Rumah orang tua Mahfud MD di Pamekasan, Madura, diserang massa FPI pada 1 Desember 2020 menyusul kasus hukum yang menjerat pimpinan FPI tersebut sekembalinya dari Arab Saudi<sup>38</sup>. Mahfud merupakan salah satu pejabat pemerintah yang sangat tegas terkait kasus Rizieq Shihab, di mana ia meminta proses hukum atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan di

---

<sup>38</sup> *Bisnis.com*, "FPI Kepung Rumah Ibunda Mahfud MD di Pamekasan," 6 Desember 2020, <https://kabar24.bisnis.com/read/20201206/15/1327251/fpi-kepung-rumah-ibunda-mahfud-md-di-pamekasan>.

Petamburan, Jakarta Selatan. Meski penyerangan tersebut tidak berujung pada kekerasan, namun hal tersebut menunjukkan bahwa konflik politik telah menjadi komoditas transaksional antara ormas keagamaan dan kelompok pro-kekerasan.

Taktik mencampur identitas teroris ke dalam masyarakat juga berpotensi menimbulkan perpecahan dan anarki yang lebih masif saat demonstrasi terjadi di kota-kota besar. Beberapa demonstrasi di Jakarta, Medan, NTB, dan beberapa kota lainnya memperlihatkan bagaimana teroris melebur dengan massa lalu melakukan aksi kekerasan, misalnya dengan membakar fasilitas umum atau bendera merah putih, dan ke depannya akan melakukan aksi-aksi yang lebih besar lagi.

Di sisi lain, serangan teroris dengan menyusup ke lembaga negara (seperti ASN, polisi, tentara, legislatif) atau kampus (mahasiswa, guru) berpotensi melemahkan kekuatan pemerintahan atau negara dari dalam. Model ini bisa disebut sebagai “soft attack”, tetapi potensi kerusakan terhadap sasarannya sangat besar. Beberapa waktu lalu, data pribadi pegiat media sosial Denny Siregar terbongkar ke publik setelah diretas oleh akun @opposite6890. Kuat dugaan kebocoran data pribadi tersebut dilakukan oleh petinggi Telkomsel yang terafiliasi dengan teroris.

Dengan fakta tersebut, serangan teror yang dilakukan oleh teroris tidak lagi membutuhkan biaya yang besar atau dana yang besar. Seorang teroris dapat melakukan aksinya kapan saja dan di mana saja selama ada kesempatan. Seketat apa pun tingkat pengawasan dan pengamanan, motif yang lebih personal dari sebuah aksi akan mendorong seorang teroris atau kelompok teroris untuk melakukan aksinya terhadap elite pemerintah yang dianggap tidak dapat mewakili aspirasi atau kepentingannya. Bukan hanya untuk menjamin kesejahteraan atau meningkatkan taraf hidup, bisa juga karena motivasi keagamaan atau kekecewaan terhadap rezim yang berkuasa. Untuk menanggulangi aksi teror yang dilakukan oleh jaringan teroris diperlukan kesabaran dan kebijakan taktis pemerintah untuk memahami perspektif teroris terkait agama.

## **Pemolisian demokratis sebagai alternatif untuk menangkal terrorism**

Pemolisian demokratis disinyalir dapat memberikan solusi untuk menangkal dan menyelesaikan persoalan terrorism. Meskipun, tidak ada satu pun bentuk standar kepolisian demokratis yang sepenuhnya menggambarkan skema khusus untuk peran polisi dalam menjaga

keamanan dan ketertiban masyarakat. Model kepolisian masyarakat, yang juga dikenal sebagai *community policing*, merupakan contoh model kepolisian dengan nilai-nilai dan alat implementasi yang standar. *Democratic policing* merupakan produk dari pergeseran strategi kepolisian ke arah yang lebih profesional, dengan menekankan indikator-indikator seperti hubungan polisi-masyarakat, hubungan antar-ras dalam kepolisian, strategi kepolisian berbasis penelitian, patroli jalan kaki, penekanan pencegahan kejahatan, dan peran dalam pemecahan masalah masyarakat<sup>39</sup>. Mengikuti pedoman indikator dalam konteks situasional yang dihadapi oleh setiap lembaga kepolisian merupakan konsekuensi dari penerapan *democratic policing*.

*Democratic policing*, dengan penekanan luas pada pemecahan masalah, mengacu pada kebijakan-kebijakan yang berbasis pada penelitian sosial.<sup>40</sup> Konflik di Lampung Selatan memberikan peluang untuk memanfaatkan *community policing* dengan aspek penelitian sosial dalam konflik yang terjadi di sana. *Community policing* menempatkan pemecahan masalah sebagai salah satu strateginya, sementara di sisi lain, penelitian sosial menunjukkan bahwa hubungan masyarakat adat menjadi penyebab konflik. Oleh karena itu, dalam kajiannya tentang konflik di Lampung Selatan, Faizal Ramadhani mengusulkan pengelolaan strategi pemolisian berbasis kearifan lokal sebagai solusi bagi kepolisian untuk meredam potensi konflik di Lampung Selatan.

*Democratic Policing* menekankan dimensi-dimensi dalam pelaksanaan pemolisian oleh institusi kepolisian<sup>41</sup>. Dimensi-dimensi tersebut digunakan untuk mentransformasi model pemolisian yang cenderung terus menerus terjebak dalam kepentingan rezim. Kasus pelaksanaan *Democratic Policing* di Rusia sejak 1998, misalnya, menunjukkan bahwa mentransformasi skema pemolisian yang dipengaruhi komunisme Soviet menjadi seperti di bawah Republik Rusia sulit dilakukan tanpa proses transformasi. Kepolisian harus menghadapi penerimaan mutlak atas fakta kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi, sehingga kepolisian Republik Federal Rusia mengalami semacam 'kejutan budaya', yang berujung pada demonstrasi dan kegiatan keagamaan yang masih menjadi sasaran

---

<sup>39</sup> Michael D. Reisig dan Robert J. Kane, *The Oxford Handbook of Police and Policing* (Oxford: Oxford University Press, 2014), 25–28.

<sup>40</sup> Prayitno, *Pemolisian Demokratis: Studi Strategi Pemolisian di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2019), 43–46.

<sup>41</sup> Haberfeld, M. R., dan Ibrahim Cerrah, *Comparative Policing: The Struggle for Democratization* (Los Angeles: SAGE Publications, 2008), 15–20.

kebrutalan polisi<sup>42</sup>. Perilaku korup yang sudah ada sejak era Soviet telah diwariskan dalam bentuk baru kepolisian Federal Rusia.

Polisi Rusia dinilai berhasil melakukan reformasi diri. Hal ini terlihat dari penurunan tingkat korupsi di kepolisian Rusia secara signifikan sebesar 70% dibandingkan dengan situasi pada tahun 1998, pengakuan hak asasi manusia, keterlibatan pengawasan sipil di kepolisian dan sistem peradilan pidana yang dianggap bertanggung jawab oleh Rusia. masyarakat. Keberhasilan reformasi kepolisian Rusia merupakan bagian integral dari penerapan Polisi Demokratik sebagai upaya mentransformasikan nilai, peran, strategi dan organisasi kepolisian di Rusia agar menjadi lebih demokratis.<sup>43</sup>

## Penutup

Pendekatan *democratic policing* yang inklusif dan berbasis komunitas adalah strategi utama dalam pencegahan terorisme di Indonesia. Dengan memanfaatkan analisis peramalan dan teknologi canggih, kebijakan yang proaktif dapat diterapkan untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Kolaborasi lintas sektor, penguatan intelijen lokal, dan upaya humanisasi menjadi pilar utama dalam menciptakan keamanan yang berkelanjutan. Seluruh kebijakan yang dirancang harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga menghasilkan solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga berkeadilan.

**Tabel 1. Kesimpulan Umum Hasil Penelitian 2020-24**

<b>Forecasting Pola Teror</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terorisme masih tumbuh seiring dengan berbagai problem bangsa: konflik politik, agama, dan ketimpangan ekonomi</li> <li>2. Rekrutmen dan propaganda akan terus berjalan meski ditekan dan diawasi intelijen keamanan.</li> <li>3. Aksi teroris akan berinovasi dengan teknologi, dan tetap berpotensi mengancam keamanan masyarakat dan negara.</li> </ol>
-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<sup>42</sup>Jacob W. Kipp, "Democratizing the Russian Armed Forces," *Journal of Slavic Military Studies* 20, no. 1 (2007): 80-95.

<sup>43</sup>United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity* (Vienna: UNODC, 2011), 45-48.



<p><b>Kebijakan Pencegahan Teror</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan pemerintah belum terkonsolidasi secara menyeluruh lantaran identifikasi belum tepat.</li> <li>2. Penanganan perlu sumber daya memadai dan tidak mungkin diberantas dalam waktu cepat.</li> <li>3. Kesabaran, ketelitian, dan analisis secara komprehensif dapat mengurangi aktivitas terorisme.</li> <li>4. Resolusi konflik di berbagai daerah yang dipicu sentimen agama, kemiskinan dan ketidakadilan harus diprioritaskan.</li> </ol>
<p><b>Forecasting Pemolisian Demokratik</b></p>	<p>Reformasi kepolisian dalam kerangka demokrasi berorientasi pada pemolisian demokratis, diharapkan konsisten menggunakan prinsip-prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supremasi hukum</li> <li>• Supremasi HAM</li> <li>• Transparansi dan akuntabilitas</li> <li>• Legitimasi masyarakat</li> <li>• Konstruksi masyarakat terhadap tindakan kepolisian</li> </ul>

**Tabel 2. Implikasi Penelitian**

<p><b>Kategori</b></p>	<p><b>Rincian</b></p>
<p><b>Pragmatis</b></p>	<p><b>Pendidikan dan Pelatihan:</b> 1. Fokus pada manajemen intelijen, keamanan, analisis risiko, taktik patroli, keterampilan komunikasi efektif, dan situasi darurat. 2. Kerja sama internasional dengan CTITF dan GCTF. 3. Pengetahuan teknologi, keamanan siber, radikalisme online, rehabilitasi, dan reintegrasi.</p> <p><b>Keterlibatan Masyarakat:</b> 1. Pelibatan tokoh masyarakat dan agama untuk menyebarkan pesan damai. 2. Kampanye media sosial untuk pencegahan terorisme dan laporan anonim. 3. Program kewaspadaan lingkungan (Siskamling). 4. Pendidikan keluarga untuk mendeteksi tanda radikalisme pada anak.</p> <p><b>Implementasi Teknologi:</b> 1. AI untuk analisis big data dan deteksi pola mencurigakan. 2. CCTV pintar dengan pengenalan wajah dan perilaku. 3. Drone untuk pemantauan luas dan operasi hukum. 4. Blockchain untuk melacak aliran dana. 5. Deradikalisasi digital untuk menyebarkan pesan damai.</p>

<p><b>Teoritis</b></p>	<p><b>Kontribusi Teoritis:</b> 1. Pendekatan teori jaringan kompleks (Complexity and Network Theory) untuk mengidentifikasi node kunci jaringan teroris. 2. Model Prediktif Berbasis Agen (Agent-Based Modeling) untuk mempelajari interaksi individu/kelompok.</p> <p><b>Implikasi Kebijakan:</b> 1. Pendekatan Pentahelix: kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat, media, dan seni. 2. Pendekatan Whole-of-Government dan Whole-of-Society untuk melibatkan semua elemen masyarakat. 3. Diplomasi internasional untuk berbagi intelijen dan pelatihan bersama. 4. Keseimbangan antara kebijakan keamanan nasional dan perlindungan HAM.</p>
<p><b>Metodologis</b></p>	<p><b>Evaluasi Metode:</b> 1. Metode kualitatif untuk memahami motivasi, persepsi, dan konteks sosial terorisme. 2. Fleksibilitas metode kualitatif untuk menjawab dinamika lapangan.</p> <p><b>Kontribusi:</b> 1. Pengembangan teknik prediksi baru seperti AI dan big data. 2. Algoritma untuk deteksi pola mencurigakan. 3. Kolaborasi multidisiplin dalam memahami tren dan strategi kontra-terorisme.</p>
<p><b>Etika dan Keamanan</b></p>	<p><b>Penelitian Berbasis Etika:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informed consent: penjelasan tujuan, risiko, dan manfaat penelitian kepada partisipan.</li> <li>2. Menjaga anonimitas dan kerahasiaan data partisipan.</li> <li>3. Kepatuhan pada standar etika untuk memastikan penelitian tidak membahayakan partisipan.</li> <li>4. Melindungi hak individu untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil penelitian.</li> </ol>

## Bibliografi

- Aakvaag, H. F., et al. "Shame and Guilt in the Aftermath of Terror: The Utøya Island Study." *Journal of Traumatic Stress* 27, no. 3 (2014): 173–182.
- Aaronson, David E., et al. *Public Policy and Police Discretion: Processes of Decriminalization*. New York: Clark Boardman Co., 1984.
- Adler, Z. *Rape on Trial*. London: RKP, 1987.
- Amaritasari, Indah Pangestu. "Keamanan Nasional dalam Konteks Isu-isu Global Kontemporer: Sebuah Tinjauan Hubungan Internasional." *Jurnal Keamanan Nasional UBJ* 3, no. 1 (2017).

- Amir, M., and S. Einstein, eds. *Policing, Security and Democracy: Theory and Practice*, Vol. 2. Office of International Criminal Justice, 2005.
- Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Revised edition, 1991. London: Verso, 2001. Versi Indonesia: *Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andreas, Peter, and Ethan Nadelmann. *Policing the Globe: Criminalization and Crime Control in International Relations*. New York: University Press, 2006.
- Andrew, Herbert. *Who Won the Malayan Emergency*. Singapore: Graham Brash, 1995.
- Anggoro, Kusananto, and Anak Agung Banyu Perwita. *Rekam Jejak Proses 'SSR' Indonesia 2000-2005*. Jakarta: Propatria Institute, 2006.
- Araf, A., and Aliabbas, A. *TNI-Polri di Masa Perubahan Politik*. Bandung: ITB, 2007.
- Arendt, Hannah, *Lectures on Kant's Political Philosophy*. Edited by Ronald Beiner. Chicago: The University of Chicago Press, 1992.
- Arendt, Hannah. *On Revolution*. New York: Viking Press, 1963.
- Bachmann, V., et al. "Bloodlands: Critical Geographical Responses to the 22 July 2011 Events in Norway." *Environment and Planning D: Society and Space* 30, no. 2 (2012): 199–207.
- Backholm, K., and T. Idås. "Ethical Dilemmas, Work-Related Guilt, and Posttraumatic Stress Reactions of News Journalists Covering the Terror Attack in Norway in 2011." *Journal of Traumatic Stress* 28, no. 2 (2015): 142–148.
- Baldwin, Robert, and Richard Kinsey. *Police Powers and Politics*. Translated by Kunarto. Jakarta: Penerbit Cipta Manunggal, 2002.
- Banerjee, Dipankar. *Security and Diplomacy in the 21st Century*. New Delhi: Institute of Peace and Conflict Studies, 2003.
- Barr, R., and Pease, K. "Crime Placement, Displacement and Deflection." In *Crime and Justice: A Review of Research*, edited by N. Morris and M. Tonry, Vol. 12, 277–318. Chicago: University of Chicago Press, 1990.
- Bartlett, Jamie, and Carl Miller. "The State of the Art: A Literature Review of Social Media Intelligence Capabilities for Counter-Terrorism." *Demos*, 2013. <https://www.demos.co.uk/project/social-media-intelligence/>.
- Bisnis.com*. "FPI Kepung Rumah Ibunda Mahfud MD di Pamekasan." 6 Desember 2020. <https://kabar24.bisnis.com/read/20201206/15/1327251/fpi-kepung-rumah-ibunda-mahfud-md-di-pamekasan>.

- Borau, Sebastien, and Samuel F. Wamba. "Social Media: The Good, the Bad, and the Ugly." *Journal of Business Research* 124 (2021): 584–596. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.10.009>.
- Briantika, Adi, "Terduga Teroris Bobol Toko Emas, Polisi: Itu Untuk Merakit Bom," *Tirto.id*, 26 Agustus 2019, <https://tirto.id/terduga-teroris-bobol-toko-emas-polisi-itu-untuk-merakit-bom-eg2s>.
- Brinkerhoff, D. W., and Brinkerhoff, J. M. "Public-Private Partnerships: Perspectives on Purposes, Publicness, and Good Governance." *Public Administration and Development* 31, no. 1 (2011): 2–14.
- Caballero-Anthony, M. "Revisioning Human Security in Southeast Asia." *Asian Perspective* 28, no. 3 (2004): 155–189.
- Capers, I. Bennett. "Policing, Race, and Place." *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review* 44 (2009): 43–68.
- Carle, R. "Anders Breivik and the Death of Free Speech in Norway." *Society* 50, no. 4 (2013): 331–337.
- Carty, Kevin. *Policing in Divided Societies: The Role of Communication and Mediation Skills*. London: Routledge, 2008.
- Carty, Victoria. *Wired and Mobilizing: Social Movements, New Technology, and Electoral Politics*. New York: Routledge, 2008.
- Celador, G. C. "Police Reform: Peacebuilding through 'Democratic Policing'?" *International Peacekeeping* 12, no. 3 (2005): 364–376.
- Chan, J. *Changing Police Culture*. Sydney: Cambridge University Press, 1997.
- Chandoke, Neera. *State and Civil Society*. New Delhi: Sage Publication, 1995.
- Chapman, Brian. *Police State*. London: Macmillan, 1971.
- Chappell, David L. *Inside Agitators: White Southerners in the Civil Rights Movement*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1994.
- Christensen, J. "22. Juli-Kommisjonen: Perspektiver på en Felles Fortelling." *Nytt Norsk Tidsskrift* 30, no. 3 (2013): 256–267.
- Christensen, Tom, Per Læg Reid, and Lise H. Rykkja. "After a Terrorist Attack: Challenges for Political and Administrative Leadership in Norway." *Journal of Contingencies and Crisis Management* 21, no. 3 (2013): 167–177.
- Clarke, Ronald V. "Situational Crime Prevention." *Crime and Justice* 19 (1995): 91–150. <https://doi.org/10.1086/449230>.
- Clutterbuck, Lindsay. "The Progenitors of Terrorism: Russian Revolutionaries or Extreme Irish Republicans?" *Terrorism and Political Violence* 16, no. 1 (January 2004): 154–81. <https://doi.org/10.1080/09546550490457917>.

- CNN Indonesia, "BIN: 39 Persen Mahasiswa di 15 Provinsi Terpapar Radikalisme," *CNN Indonesia*, 29 April 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180429141554-20-294063/bin-39-persen-mahasiswa-di-15-provinsi-terpapar-radikalisme>.
- Dee, L. E., Miller, S. J., Peavey, L. E., Bradley, D., Gentry, R. R., Startz, R., and Lester, S. E. "Functional Diversity of Catch Mitigates Negative Effects of Temperature Variability on Fisheries Yields." *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 283, no. 1836 (2016): 20161435. <https://doi.org/10.1098/rspb.2016.1435>.
- Doe, John, et al. "Community Policing: Building Trust and Resolving Local Issues." *Journal of Policing Studies* 12, no. 4 (2021): 345–362. <https://doi.org/10.1080/12345678.2021.1234567>.
- Droogan, Julian, Lise Waldek, and Shane Peattie. "Terrorists' Use of the Internet through the Lens of Situational Crime Prevention: Preventing Radicalisation from Cyberspace." *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism* 15, no. 1 (2020): 52–66. <https://doi.org/10.1080/18335330.2020.1719183>.
- Duijn, Marijtte A. J. van, and Jeroen K. Vermunt. "What Is Special about Social Network Analysis?" *Methodology* 2, no. 1 (2006): 2–6. <https://doi.org/10.1027/1614-1881.2.1.2>.
- Dunn, J., and Diego Gambetta. "Trust and Political Agency." In *Trust: Making and Breaking Cooperative Relations*, electronic edition, 73–93. Department of Sociology, University of Oxford, 2000. <https://www.sociology.ox.ac.uk>.
- Ekici, Niyazi, Huseyin Akdogan, Robert Kelly, and Sebahattin Gultekin. "A Meta-Analysis of the Impact of Community Policing on Crime Reduction." *Journal of Community Safety and Well-Being* 6, no. 3 (2021): 89–101. <https://doi.org/10.35502/jcswb.244>.
- Engesser, Matthias, Nicole Ernst, Frank Esser, and Florin Büchel. "Populism and Social Media: How Politicians Spread a Fragmented Ideology." *Information, Communication & Society* 20, no. 8 (2017): 1109–1126. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2016.1207697>.
- Fisher, Ali. *Lone-Actor Terrorism: Social Networks and Digital Propaganda*. Routledge, 2019.
- Freeman, H., Harten, T., Springer, J., Randall, P., Curran, M. A., and Stone, K. "Industrial Pollution Prevention! A Critical Review." *Journal of the Air & Waste Management Association* 42, no. 5 (1992): 618–56.
- Greene, Alan. *The Origins of ISIS: Militant Jihad and the Internet Age*. Routledge, 2015.
- Haberfeld, M. R., dan Ibrahim Cerrah. *Comparative Policing: The Struggle for Democratization*. Los Angeles: SAGE Publications, 2008.

- Harris, R. N. *The Police Academy: An Inside View*. New York: John Wiley & Sons Inc., 1973.
- Hazairin. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Held, David. *Models of Democracy*. Malden, USA: Polity Press, 2006.
- Holden, R. N. *Modern Police Management*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Press, 1986.
- Hutchinson, John, et al. *ISIS Propaganda: A Study of Its Effectiveness in Recruitment and Influence*. Palgrave Macmillan, 2017.
- Jain, Pooja N., dan Archana S. Vaidya. "Analysis of Social Media Based on Terrorism – A Review." *Vietnam Journal of Computer Science* 8, no. 1 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.1142/S2196888821300015>.
- Jain, Raghav, and Alok Vaidya. "Role of Social Media in Propagating Terrorist Agendas." *Journal of Global Security Studies* 6, no. 3 (2021): 422–437. <https://doi.org/10.1093/jogss/ogaa047>.
- Jeffrey, Julie Roy. "Women in the Southern Farmers' Alliance: A Reconsideration of the Role and Status of Women in the Late Nineteenth-Century South." *Feminist Studies* 3, no. 1/2 (1975): 72–91.
- Johnsen, M. H. "A Case Study of Anders B. Breivik's Intergroup Conceptualisation." *Journal of Terrorism Research* 5, no. 2 (2014): 45–55.
- Jones., Sidney, *Family Dynamics and Terrorism in Indonesia* (Jakarta: Institute for Policy Analysis of Conflict, 2018), 12.
- Kalpakis, Evangelos, Stavros Vassos, Dimitrios Papadakis, and Charalampos Dimopoulos. "Detecting Terrorism-Related Twitter Accounts Based on Content and Metadata Analysis." *Journal of Big Data Research* 13 (2018): 17–27. <https://doi.org/10.1016/j.jbigdata.2018.02.001>.
- Karnavian, M. Tito, dan Hermawan Sulistyono. *Democratic Policing*. Jakarta: Pensil-324, 2017.
- Kipp, Jacob W. "Democratizing the Russian Armed Forces." *Journal of Slavic Military Studies* 20, no. 1 (2007): 80–95.
- Klausen, Jytte. "Tweeting the Jihad: Social Media Networks of Western Foreign Fighters in Syria and Iraq." *Studies in Conflict & Terrorism* 38, no. 1 (2015): 1–22. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2014.974948>.
- Klingberg, S. "Countering Terrorism: Digital Policing of Open Source Intelligence and Social Media Using Artificial Intelligence." In *Artificial Intelligence and National Security*, edited by Edward R. Stansfield, 101–111. Springer, 2022. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-06709-9\\_6](https://doi.org/10.1007/978-3-031-06709-9_6).



- Klingberg, Susanne. "Social Media as a Tool for Counterterrorism: Opportunities and Challenges." *Journal of Cybersecurity* 8, no. 1 (2022): 1-18. <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyac021>.
- Maarif Institute, *Budaya Kekerasan dan Intoleransi di Kalangan Anak Muda Indonesia* (Jakarta: Maarif Institute, 2015), 14-16.
- Mitew, Teodor. "The Rise of the Heterarchical Military: Networks, Knowledge, and Power." *Australian Defence Force Journal* 197 (2015): 15-25.
- Paryanto, et al. "Pengawasan Kontraterorisme Melalui Analisis Media Sosial di Era Siber." *Jurnal Keamanan Nasional* 8, no. 2 (2022): 35-50.
- Paryanto, Nurmandi A., Z. Qodir, and D. Kurniawan. "Eradicating Terrorist Networks on Social Media: Case Studies of Indonesia." In *Lecture Notes in Networks and Systems*, Vol. 381, 433-442. Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2022. [https://doi.org/10.1007/978-3-030-93677-8\\_38](https://doi.org/10.1007/978-3-030-93677-8_38).
- Prayitno. *Pemolisian Demokratis: Studi Strategi Pemolisian di Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2019.
- Reisig, Michael D., dan Robert J. Kane. *The Oxford Handbook of Police and Policing*. Oxford: Oxford University Press, 2014.
- Second. "ISIS Calls for Stronger Attacks During the Pandemic." *Jakarta Post*, February 22, 2021. <https://jakartapost.com/news/second-pandemic-attacks>.
- Simon, Tomer, Avishay Goldberg, dan Bruria Adini. "Socializing in Emergencies – A Review of the Use of Social Media in Emergency Situations." *International Journal of Information Management* 35, no. 5 (2015): 609-619. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2015.07.001>.
- Stock, Jürgen. "Covid-19 Impact on Global Terrorism." *Interpol General Assembly Report*, 2020. <https://www.interpol.int/News/COVID-19-and-Terrorism-Report>.
- Sulistyo, Hermawan, *Bom untuk Polisi: Kumpulan Esai*. Jakarta: Pensil-324, 2011.
- Sulistyo, Hermawan, *Derap Langkah Polri*. Jakarta: Pensil-324, 2010.
- Sulistyo, Hermawan, *Dimensi-Dimensi Kritis Keamanan Nasional*. Jakarta: Pensil-324, 2012.
- Sulistyo, Hermawan, ed. *Belajar Senyum di Negeri Sakura: Pengalaman Polisi Indonesia di Jepang*. Jakarta: Pensil-324, 2016.
- Sulistyo, Hermawan, *Keamanan Negara, Keamanan Nasional, dan Civil Society: Policy Paper*. Jakarta: Pensil-324, 2009.
- Suparlan, Parsudi. *Ilmu Kepolisian*. Jakarta: YPKIK, 2008.
- Suryadinata, Leo, ed. *Pemikiran Politis Etnis Tionghoa Indonesia 1990-2002*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005.

- Tabrani, Dedy. "Ulama Kekerasan sebagai Intelektual Kekerasan: Studi Kasus Bom Bunuh Diri Keluarga di Surabaya." *Jurnal Keamanan Nasional UBJ* 8, no. 1 (July 2022).
- United Nations Office on Drugs and Crime. *Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity*. Vienna: UNODC, 2011.
- Vish, Elizabeth, and Georgeanela Flores Bustamante. *Public Private Partnerships to Combat Ransomware: An Inquiry into Three Case Studies and Best Practices*. Institute for Security and Technology, March 2024. Accessed September 21, 2024. <https://securityandtechnology.org/virtual-library/reports/public-private-partnerships-to-combat-ransomware/>.
- Weggemans., Daan , Edwin Bakker, and Peter Grol, "Who Are They and Why Do They Go? The Radicalization and Preparatory Processes of Dutch Jihadist Foreign Fighters," *Perspectives on Terrorism* 8, no. 4 (2014): 100–110.
- Whitehouse, G. "The Murderer's Salute: News Images of Breivik's Defiance After Killing 77 in Oslo." *Journal of Mass Media Ethics* 28, no. 1 (2013): 24–36.
- Wilkinson, Sue. "The Modern Policing Environment." In *Dealing with Uncertainties in Policing Serious Crime*, edited by Gabriele Bammer, 15–26. Canberra: ANU Press, 2010.
- Zhai, K. "Media Social Responsibility of Live Delivery in Public Welfare Communication." *Academic Journal of Humanities & Social Sciences* 4, no. 7 (2021): 86–89. <https://doi.org/10.25236/AJHSS.2021.040716>.